

Menyongsong Hari Esok  
dengan Optimisme dan Integritas

## Laporan Kinerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Papua, Papua Barat dan Maluku



## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka merealisasikan pertanggungjawaban atas pencapaian target yang dibebankan kepada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selama tahun 2024. Laporan Kinerja dimaksud wajib dibuat oleh setiap instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk kepatuhan kami terhadap peraturan yang dimaksud, sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam rangka mewujudkan *good governance*, serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam waktu mendatang. Selain itu, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai input bagi Kantor Pusat DJKN dalam rangka melaksanakan penilaian produktivitas kantor-kantor vertikal.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai dan jajaran vertikal di Lingkup Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku atas kerjasama dan kerja kerasnya dalam pengumpulan data dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 .

Kami harap Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jayapura, 31 Januari 2025  
Kepala Kantor Wilayah DJKN  
Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani secara elektronik  
Kristijanindyati Puspitasari



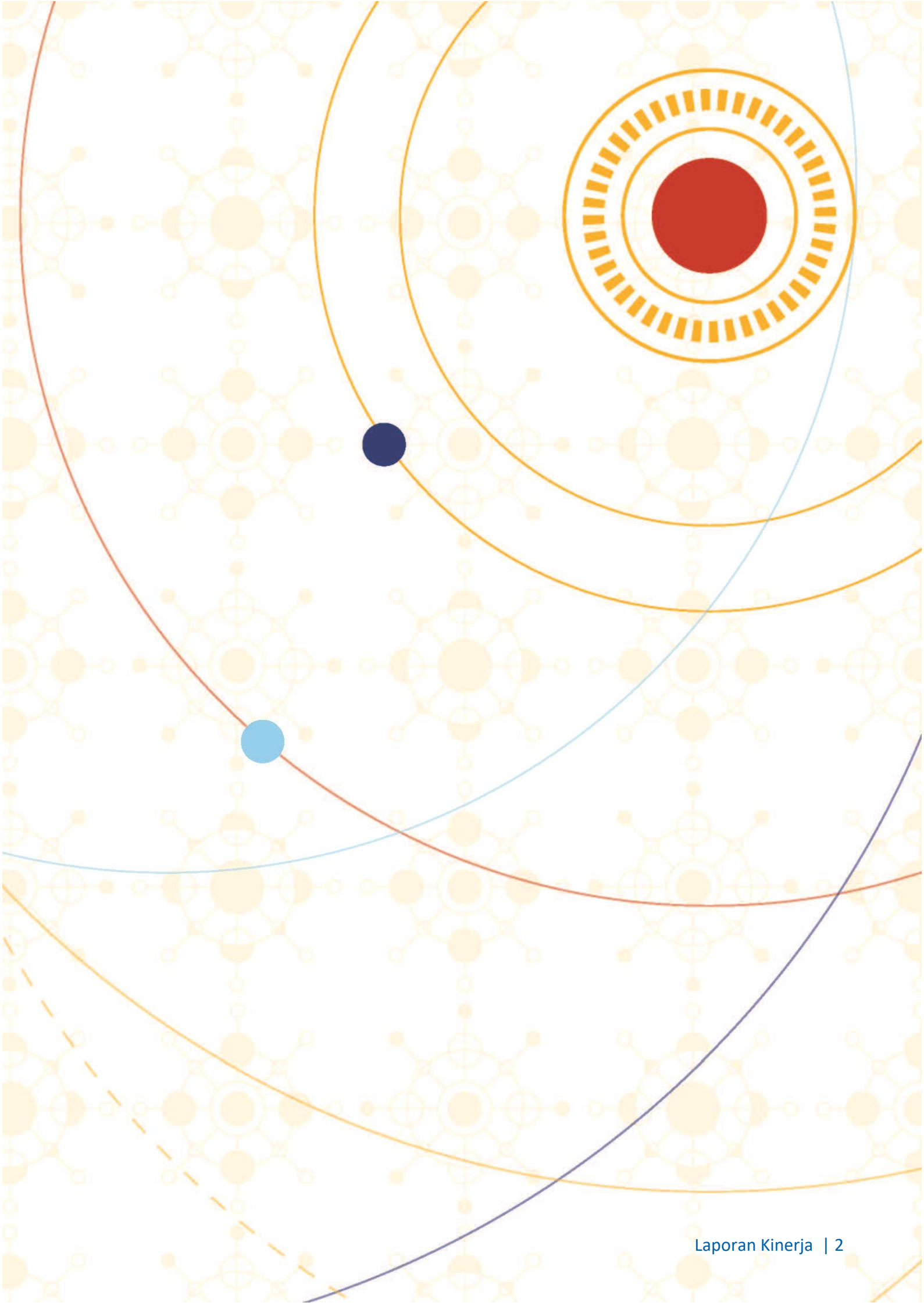
# Daftar Isi

	Pendahuluan	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
		Sumber Daya Manusia	7
		Sarana dan Prasarana	9
		Peran Strategis	10
		Permasalahan	11
		Upaya Pemecahan Masalah	12
	Perencanaan kinerja	Rencana Strategis	15
		Penetapan Kontrak Kinerja Tahun 2024	18
		Addendum Kontrak Kinerja Tahun 2024	20
	Akuntabilitas Kinerja	Capaian Kinerja Organisasi 2024	24
		Kinerja Lainnya	64
		Realisasi Anggaran	68
	Penutup Lampiran	Penutup	71
		Lampiran	72

# BAB I

## Pendahuluan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat dari pengelolaan dari peredaran uang negara.



# Bab I

## Pendahuluan

### A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

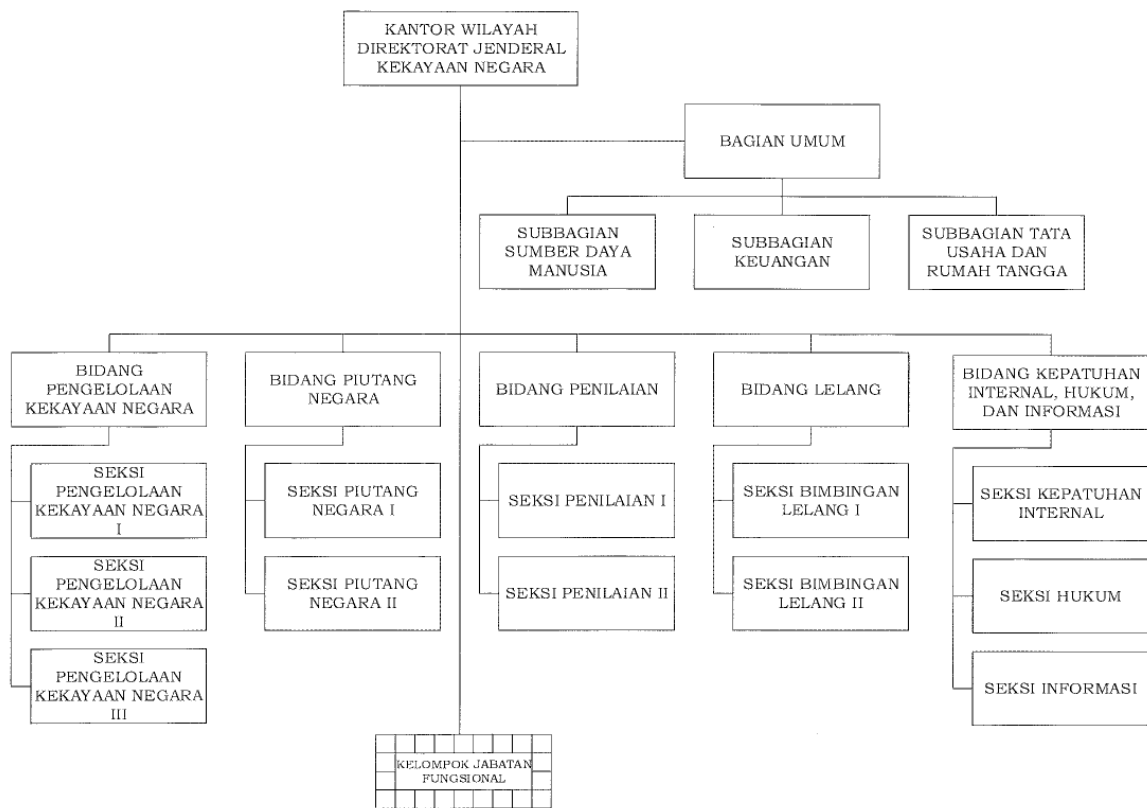
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan unit instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang terdiri dari 1 jabatan struktural eselon II (kepala kantor), 6 jabatan eselon III, dan 15 jabatan eselon IV sebagai berikut.

1. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara (BMN) di lingkungan kantor wilayah.
2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kantor Wilayah.
3. Bidang Penilaian, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.
4. Bidang Piutang Negara, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan

penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara.

5. Bidang Pelayanan Lelang, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang.
6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
  - b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan; dan
  - c. melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyajian informasi, dan hubungan kemasyarakatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

Bagan Organisasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku saat ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang dengan wilayah mencakup 7 provinsi, yaitu:

1. Provinsi Papua;
2. Provinsi Papua Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah);
3. Provinsi Papua Pegunungan (UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan);
4. Provinsi Papua Selatan (berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan);
5. Provinsi Papua Barat;
6. Provinsi Papua Barat Daya (UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya);

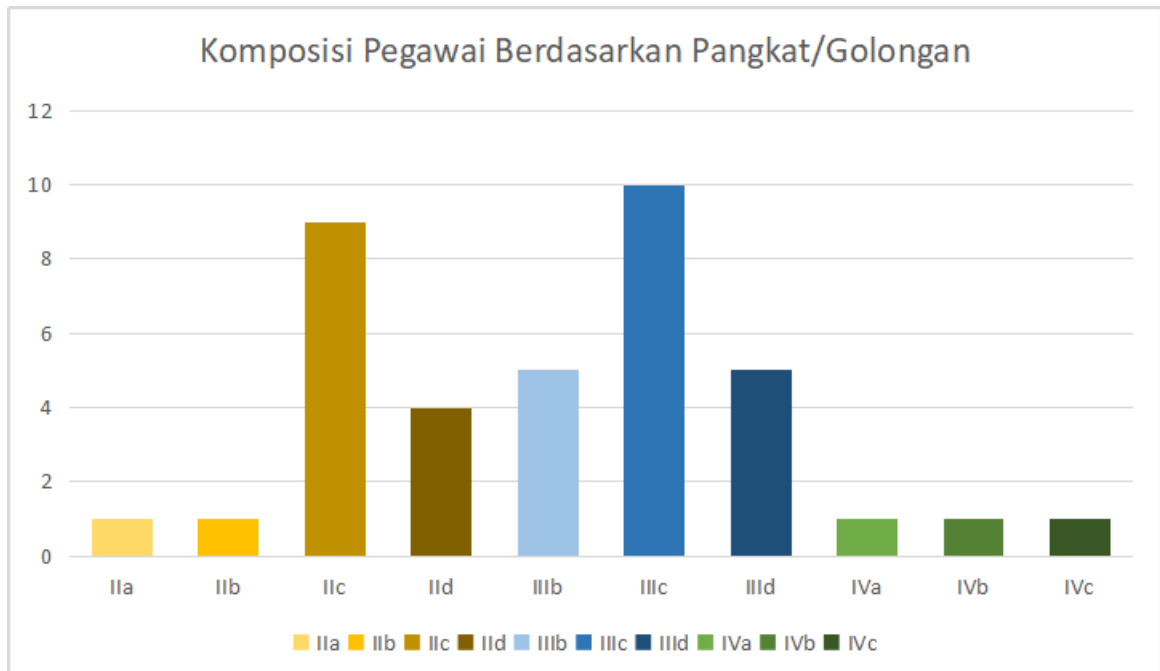
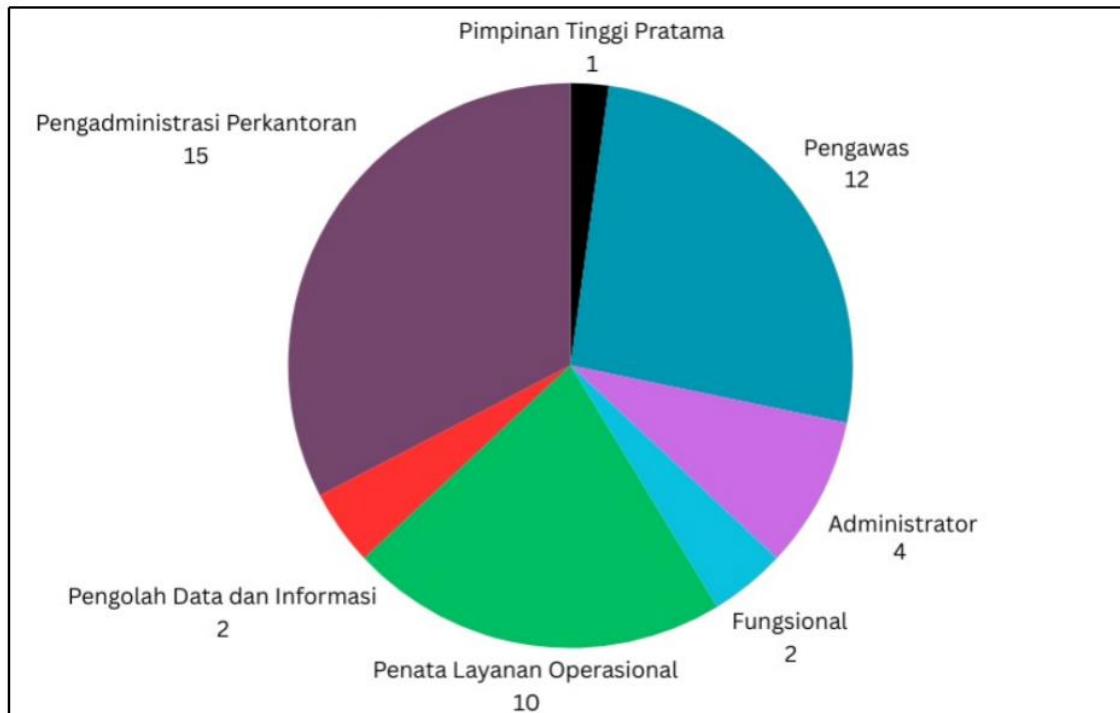


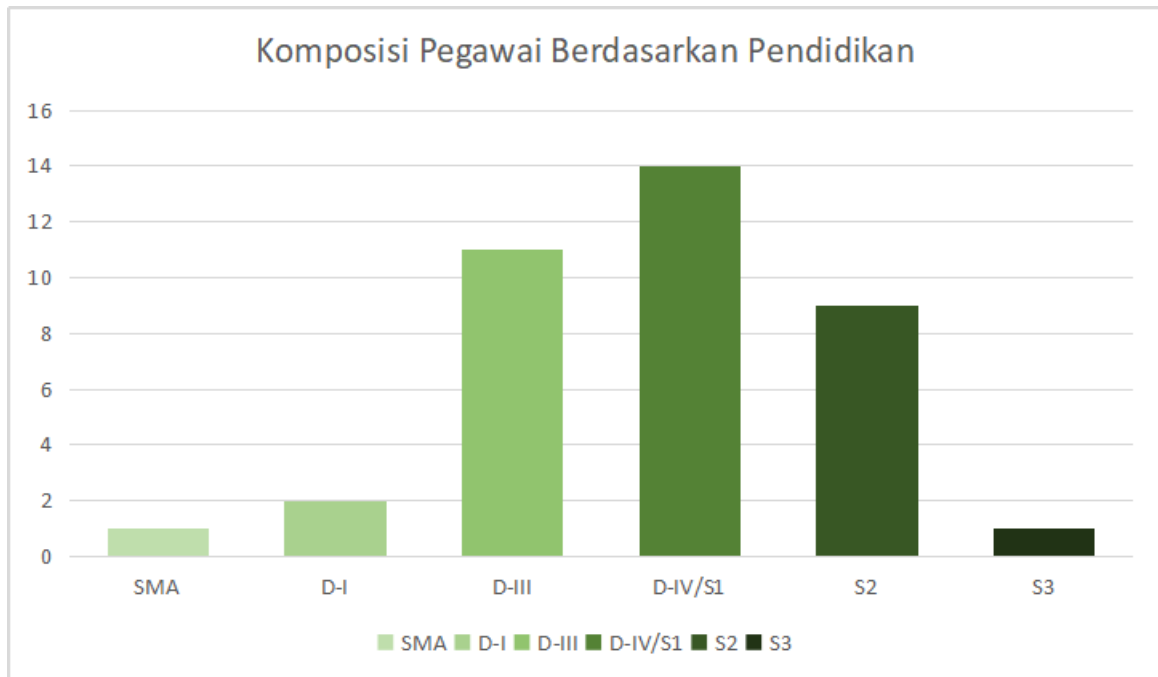
6. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
7. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

## **B. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan di Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Jumlah pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku serta kantor operasional di bawahnya per tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 38 pegawai termasuk dengan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sebanyak 2 (dua), dengan komposisi sebagai berikut :

## Komposisi Pegawai Menurut Jabatan





Disamping pegawai berstatus ASN, terdapat 5 pegawai berstatus PPNPN yang membantu kelancaran pekerjaan administrasi perkantoran maupun mobilitas.

### C. Sarana dan Prasarana

Dalam kegiatan operasionalnya Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku telah menempati Gedung Keuangan Negara Jayapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 08 Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Disamping itu, guna kelancaran tugas Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Kendaraan dinas jabatan 1 (satu) unit mobil kondisi baik;
2. Kendaraan dinas operasional sebanyak 8 (delapan) unit minibus kondisi 5 (lima) baik dan 3 (tiga) rusak ringan dan 2 (dua) unit sepeda motordalam kondisi baik;
3. komputer (PC) sebanyak 20 (dua puluh) unit, 18 (delapan belas) unit dengan kondisi baik dan 1 (satu) unit dalam kondisi rusak ringan dan 1 (satu) unit diusulkan henti guna. Sarana laptop sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dalam kondisi baik;
4. ruang kerja yang ber-AC; dan sarana penunjang lainnya berupa peralatan dan mesin yang merupakan instalasi Gedung Keuangan Negara Jayapura;
5. rumah dinas 10 (sepuluh) unit dengan 4 (empat) unit dalam kondisi baik dan 6 (enam)

unit dalam kondisi rusak ringan.

#### D. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi penyelenggaraan negara di bidang keuangan negara, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku memiliki peran strategis sebagai berikut:

##### 1. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran Strategis Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara adalah mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasilguna kekayaan negara yang difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara pada wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Selain itu Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga memiliki tugas melaksanakan Penilaian Aset (BMN) yang berperan strategis untuk menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Use* atau HBU).

##### 2. Memberikan pembinaan pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di bidang Pengurusan Piutang Negara adalah penyelamatan keuangan Negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* (NPL) menjadaset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan melalui proses penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan unit lain sesuai ketentuan yang berlaku.

##### 3. Memberikan pelayanan Lelang

Lelang berperan besar dalam menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku senantiasa mengupayakan penggalan lelang secara terus-menerus baik lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi sehingga lelang oleh KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku senantiasa menjadi salah satu sarana jual beli yang diminati masyarakat dan juga menjadi salah satu terobosan

untuk ikut serta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Lelang memiliki 3 peran dalam perekonomian nasional yaitu:

- a. membantu pemulihan keuangan negara dengan menegakkan hukum melalui penjualan barang rampasan, sitaan dan barang milik negara;
- b. menyelesaikan kredit macet atau *nonperforming loan* (NPL) dengan tujuan untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan, melalui pencairan agunan dengan penjualan lelang;
- c. menggerakkan roda perekonomian dengan meningkatkan potensi nilai barang dan membuka lapangan pekerjaan.

4. Memberikan kontribusi pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, DJKN memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, DJKN memperoleh hasil bea lelang termasuk biad lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP. Sedangkan dalam pemberian pelayanan pengelolaan BMN di peroleh pemasukan ke kas negara berupa PNBP pengelolaan BMN.

## E. Permasalahan

### Permasalahan Internal

- a. jumlah pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) *existing* yang kurang memadai dibandingkan cakupan wilayah Kanwil DJKN yang cukup luas meliputi provinsi (Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Maluku) dengan *stakeholder* yang cukup banyak;
- b. anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari jajaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Hal ini karena luas dan sulitnya medan kerja yang menjadi wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku; dan pemekaran wilayah propinsi papua menjadi beberapa provinsi baru dan juga pemekaran wilayah setingkat kabupaten;

### Permasalahan Eksternal

- a. kondisi geografis alam yang berat (didominasi pegunungan) dan luasnya wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut atau udara. Selanjutnya, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Daya telah mengalami pemekaran sehingga mengakibatkan kebutuhan pengendalian yang lebih tinggi, pada kondisi geografis yang berat;
- b. kondusifitas tingkat keamanan yang tidak stabil dan sulit diduga di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku; dan
- c. adanya regulasi dan sistem norma setempat yang kurang mendukung tercapainya target kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Seperti misalnya norma keharusan memberikan kompensasi adat untuk pelepasan tanah, sehingga untuk lelang tanah, kurang menarik bagi calon pembeli. Demikian juga dalam penertiban BMN, perluasan PNBK dari pemanfaatan/pengelolaan aset ikut terdampak kurang menguntungkan.

## F. Upaya Pemecahan Masalah

### Pemecahan Permasalahan Internal

- a. telah diajukannya permohonan kepada kantor pusat DJKN melalui sarana formal maupun informal guna mengirimkan pegawai ditempatkan di Lingkup Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Selain itu dalam kondisi existing pegawai yang masih belum memenuhi jumlah ideal, kami tetap berupaya memaksimalkan sumberdaya yang ada antara lain dengan pengaturan komposisi dan penempatan pegawai pada bidang tuis yang diharapkan memaksimalkan potensi dan kinerja. Dari sisi kompetensi kami berupaya menjaga dan selalu meningkatkan level kompetensi dan skill para pegawai dengan mengikutkan pada berbagai pelatihan/diklat/workshop dan berbagai bentuk pembelajaran peningkatan kompetensi, baik di lingkungan internal kantor maupun eksternal;
- b. mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL, serta melakukan *refocusing* pada belanja operasional dengan menekankan efisiensi anggaran guna memastikan bahwa setiap pengeluaran dialokasikan secara optimal untuk mendukung kegiatan prioritas tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

## Pemecahan Permasalahan Eksternal

- a. mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk jenis belanja modal dan belanja barang, mengadakan acara/kegiatan kedinasan yang dipusatkan di satu tempat dan memanggil/mengumpulkan *stakeholder* di satu tempat;
- b. lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas, dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko kerawanan tinggi;
- c. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang serta pemerintah daerah untuk mendapatkan solusi yang tepat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal Papua.

## Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kontrak Kinerja Tahun 2024
- C. Addendum Kontrak Kinerja Tahun 2024

kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia



## Bab II

### Perencanaan Kinerja

#### A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-245/KN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2022-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi DJKN, yaitu **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"**. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **akuntabel** artinya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

## 1. Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

- a. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- c. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
- e. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif, sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

## 2. Tujuan

- a. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. pelayanan Lelang yang modern dan terpercaya;
- c. pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
- d. birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

## 3. Sasaran

- a. mempercepat penyelesaian kasus Piutang Negara dan pencapaian target IKU;
- b. tercapainya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang efektif, efisien dan terpercaya;
- c. meningkatkan kualitas Pelayanan Lelang;
- d. meningkatkan pengelolaan data dan meminimalisasi perkara hukum;
- e. melakukan Inventarisasi Kekayaan Negara secara menyeluruh, untuk meningkatkan manfaat dari kekayaan negara serta utilisasi kekayaan negara secara umum;
- f. melaksanakan Penilaian Kekayaan Negara sehingga diketahui nilai riil kekayaan negara; dan
- g. meningkatkan dukungan teknis dan administrasi Kanwil DJKN.

#### 4. Kebijakan dan Program Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui kebijaksanaan dan program.

##### a. Kebijakan

Kebijakan Pengurusan Piutang, Lelang, Kekayaan Negara dan Penilaian Kekayaan Negara telah ditetapkan meliputi:

- 1) Peningkatan Pembinaan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara percepatan penyelesaian (*Crash Program*);
- 2) Peningkatan pengawasan dan pembinaan kualitas Pelayanan Lelang;
- 3) Peningkatan kualitas, pengawasan, dan pembinaan dalam Pengelolaan Kekayaan Negara termasuk diantaranya *The Irian Jaya Joint Development Foundation* (IJJDF);
- 4) Peningkatan pengawasan dan pembinaan kualitas dalam Pelayanan Penilaian;
- 5) Peningkatan kualitas penyajian informasi publik dan optimalisasi penanganan perkara.

##### b. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijaksanaan yang dijalankan oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku diuraikan dalam program sebagai berikut :

- 1) Percepatan pelayanan Pengurusan Piutang Negara berupa *Crash Program*;
- 2) percepatan pelayanan Lelang;
- 3) Optimalisasi sistem administrasi data Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang, dan Lelang;
- 4) Optimalisasi upaya penyelesaian Perkara;
- 5) pelayanan di Bidang Umum yang meliputi: Kepegawaian, Keuangan, dan TURT;

- 6) tertib administrasi BMN;
- 7) Optimalisasi utilisasi kekayaan negara;
- 8) Optimalisasi Penilaian BMN;
- 9) Optimalisasi Informasi Publik;
- 10) Optimalisasi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK); dan
- 11) Optimalisasi Keamanan Informasi.

## B. Penetapan Kontrak Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2024 sesuai dengan Peta Strategis Kemenkeu Two terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian lengkap tentang SS dan IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	
			Kuantitas/ Output	Kualitas/ Mutu
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100
		1c-CP Indeks Integritas	89.17	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100
		2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2024	
				Kuantitas/ Output	Kualitas/ Mutu
		2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	100
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp842,07 M)	100
		2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100% (Rp3,05 M)	100
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	100
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	100
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portfolio Aset)	100%	100
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	69% (27 berkas)	100
		5b-CP	Persentase produktivitas Lelang	89%	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	16%	100
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	100
		7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100
		8b-N	Deviasi data PNBP fungsional DJKN	10%	100
9	Komunikasi Publik yang Efektif	9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	100
		9b-N	Indeks Pengelolaan	80	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	
			Kuantitas/ Output	Kualitas/ Mutu
		Layanan Informasi Publik (PPID)		
10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	10a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	100
		10b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM	100	100

## C. Addendum Kontrak Kinerja Tahun 2024

### 1. Addendum Pertama

Pada bulan Mei 2024, dilakukan Addendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-29/KN/2024 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2024, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
2.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (3,05 M)	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (3,82 M)
8.	Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	8a-CP	Indeks kinerja anggaran	100

#### b. Perubahan Rincian target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
1c-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1c-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100	100	100	100	100	100	2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	100	100	100	100	100	100
2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5	2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	-	40	40	60	60	100	100	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	20	40	40	60	60	100	100

8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
10a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	10a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82
10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBSM	-	-	-	-	-	100	100	10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBSM	100	100	100	100	100	100	100

## 2. Addendum Kedua

Pada bulan September 2024, dilakukan Adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-29A/KN/2024 2024 yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### a. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	69% (27 Berkas)	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67% (26 Berkas)

### b. Perubahan Rincian target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	92%	92%	85%	85%	69%	69%	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	92%	92%	82%	82%	67%	67%

## 3. Addendum Ketiga

Pada bulan November 2024, dilakukan Adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-29B/KN/2024 2024 yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### a. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
2.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (3,82 M)	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (4,33 M)

**Bab III**  
**Akuntabilitas Kinerja**



Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karena peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat



## Bab III

### Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi 2024

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku adalah sebesar 113.59%.

Rincian capaian pada sasaran strategis dan indikator masing-masing IKU tergambar sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	110.36%	110,36%
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	103,67%	103,67%
		Indeks Integritas	89.17	92.44	103,67%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	117.21%	117.21%
		Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhann	71.5%	87.57%	122.47%
		Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86.5%	98.68%	114.08%
		Persentase realisasi pokok lelang	100%	61.27%	61,27%
		Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	1614.36%	1614.36%
3.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	109.67	146,22%
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	164.37%	164,37%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
		Persentase evaluasi kinerja BMN (Portfolio Aset)	100%	132.71%	132,71%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	6%	48.72%	127,29%
		Persentase produktivitas lelang	89%	120.21%	135,07%
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0.02%	199,89%
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	99.91	116,48%
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
8.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120,00%
		Deviasi data PNBK fungsional DJKN	10%	0%	200%
9.	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	5.23	147,32%
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100	125,00%
10.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	95.87	116,91%
		Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM	100%	120%	120,00%
NILAI NKO			113,59%		

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)			
1	31,83%	2	21,95%
	Stakeholder (30%)		Customer (20%)
3	30,00%	4	29,81%
	Internal Process (25%)		Learning and Growth (25%)
<b>NKO</b>		<b>113,59%</b>	

Selama tahun 2024, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku memiliki capaian 19 IKU berstatus hijau dan satu IKU berstatus merah.

Penjelasan masing-masing IKU untuk setiap sasaran strategis dapat diterangkan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mendapatkan mandat merumuskan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN mengelola kekayaan negara. Pelaksanaan mandat dan tugas tersebut akan dilaksanakan oleh DJKN penuh integritas dan secara akuntabel. Pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan oleh DJKN mendukung transformasi ekonomi yang digaungkan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan suatu kondisi perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan

Pencapaian Sasaran strategis ini diperoleh dengan mengidentifikasi kinerja utama yang meliputi aktivitas pelayanan yang menjamin tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan; Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dan menjaga integritas.

**IKU-1: Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan**

IKU ini bertujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan Kemenkeu kepada pengguna layanan dan stakeholders. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023

Dalam tahun 2024, IKU tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan telah dapat tercapai melampaui target, yakni 110,36%. IKU ini dicascadingkan ke KPKNL Ambon, dengan 2 komponen : yakni IKPL dengan capaian 112,19% dan Penyelesaian Tindaklanjut dengan capaian 100%. Adapun secara trajectory dari pencapaian IKU tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

K-WIDE	ss 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
	1a-CP - Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	27.78%	83.33%	83.33%	100%	100%	110.36%	110.36%	
Capaian	138.90%	166.66%	166.66%	142.86%	142.86%	110.36%	110.36%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	110.36	110.36	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Selanjutnya dikaitkan dengan pelaksanaan IKU selama lima tahun terakhir, realisasi capaian menunjukkan tren dinamis dalam kategori sangat baik yakni selalu > 100% target. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	100	4,5	4.15	4.35	-	110.36
<b>2023</b>	100	4.10	4.10	4.10	-	106.40
<b>2022</b>	100	4.05	4.05	4.05	-	155.07
<b>2021</b>	4.40	4	4	4.27	-	4.73
<b>2020</b>	4.30	4.34	4.34	4.26	-	4.67

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah menampakkan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat diperbandingkan.

## **IKU-2: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang**

Tujuan dari IKU ini adalah guna mendorong kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal terhadap penerimaan negara dan ketahanan APBN.

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Ditjen Perbendaharaan

Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Juga Penerimaan yang diperoleh dari hasil pengurusan piutang negara termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

Pada tahun 2024, capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, berhasil tercapai sebesar Rp50.855.000.732,- atau sebesar 103,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 49.055.400.000,-

Adapun gambaran trajectory pencapaian IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tahun 2024, sebagai berikut:

K-WIDE	ss 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
	1b-CP - Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	100%	45%	45%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	154.37%	99.59%	99.59%	86.38%	86.38%	102.45%	102.45%	
Capaian	154.37%	221,30%	221,30%	86.38%	86.38%	102.45%	102.45%	
Nilai Kinerja	120	120	120	86.38	86.38	102.45	102.45	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Gambaran keterkaitan capaian IKU selama lima tahun terakhir, bahwa sejak dicanangkan mulai tahun 2020, maka capaiannya pada tahun 2020 masih dibawah target. Selanjutnya dalam empat tahun terakhir capaian dari penerimaan negara ini selalu diatas 100%, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	100	100	100	100	-	102.45
<b>2023</b>	100	100	100	100	-	109,13
<b>2022</b>	100	100	100	100	-	155,07
<b>2021</b>	100	100	100	100	-	138.99
<b>2020</b>	100	100	100	100	-	65.97

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah menampakkan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat diperbandingkan.

### **IKU-3: Indeks Integritas**

Tujuan dari IKU ini adalah untuk menilai tingkat integritas satuan organisasi Kementerian Keuangan.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

- ❖ Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.
- ❖ Responden terdiri dari :
  - Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
  - Eskternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
- ❖ Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:
  - Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
  - Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
  - Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
  - Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
  - Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan

proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

❖ Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

Internal

- Perdagangan Pengaruh;
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengelolaan SDM;
- Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
- Sosialisasi Antikorupsi; dan
- Transparansi.

Eksternal

- Upaya Pencegahan Korupsi;
- Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
- Integritas Pegawai.

Capaian IKU pada tahun 2024 Kanwil adalah sebesar 103,6% dari yang target yang ditetapkan, dengan trajectory sebagai berikut:

<b>K-WIDE</b>	<b>SS 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan</b>							
	<b>1c-CP - Indeks Integritas</b>							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	-	-	-	-	-	89.17	89.17	
Realisasi						92.44	92.44	
Capaian						103,67%	103,67%	
Nilai Kinerja						103,67	103,67	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Selanjutnya dalam lima tahun terakhir apabila diperbandingkan, capaian IKU meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. IKU ini telah tercantum dalam Dokumen Renstra Kementerian Keuangan, dan rencana kerja (renja). Mulai dimunculkan menjadi target Kanwil dimulai tahun 2023.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	

<b>2024</b>	89.17	92	92	92	-	92.44
<b>2023</b>	88.67	91.5	91.5	91	-	89.17
<b>2022</b>	-	91	91	91	-	-
<b>2021</b>	-	90.5	90.5	90.5	-	-
<b>2020</b>	-	90	90		-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah menampakkan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat diperbandingkan.

### Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi.

Indikator sasaran strategis ini dapat didekati dengan Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara; Persentase realisasi pokok lelang; Persentase penurunan outstanding Piutang Negara. Untuk IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara tergambar pada 2 sub-iku yakni Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan dan Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN.

#### IKU-4: Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Tujuan dari IKU ini adalah mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara.

IKU ini terdiri dari 2 komponen pengukuran yang dijadikan sub-iku yaitu:

1. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).

SBSK BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN

sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Pada tahun 2024 pencapaian IKU ini adalah berstatus hijau dengan reliasasi capaian sebesar 117,21% dari target 100%. Capaian penyelesaian NUP sampai dengan triwulan IV 2024 dengan target 10.722 NUP, kesesuaian penggunaan BMN dengan standar SBSK pada IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara terealisasikan seluruhnya dengan capaian pendataan 100%.

2. Tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Adapun secara trajectory capaian IKU ini dapat digambarkan sebagai berikut:

K-WIDE	SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-Cp - Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara								
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4		Y-24	POL/KP
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	-	183.85%	183.85%	154%	154%	117.21%	117.21%	117.21%	
Capaian	-	183,85%	183,85%	154%	154%	117,21%	117,21%	117,21%	
Nilai Kinerja	-	120	120	120	120	117.21	117.21	117.21	

Selanjutnya dalam lima tahun terakhir apabila diperbandingkan, IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2024. Sedangkan Sub IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan sub iku Tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara telah dilakukan sejak 2020.

	TARGET	Realisasi
--	--------	-----------

Tahun	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	117.21
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

#### **IKU-5: Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Tujuan dari IKU ini adalah untuk Meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada masyarakat serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan lelang.

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Capaian iku ini pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 61,27% dari target 100%. Secara rupiah Realisasi Pokok Lelang sebesar sebesar Rp515.962.757.211,- dari target sebesar Rp842.076.000.000,-, dengan demikian status capaian adalah merah. Adapun trajectory capaian sebagai berikut

K-WIDE	SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP - Persentase realisasi pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	58.51%	59.73%	59.73%	39.90%	39.90%	61.27%	61.27%	
Capaian	58,51%	59.73%	59.73%	39.90%	39.90%	61.27%	61.27%	
Nilai Kinerja	58.51	59.73	59.73	39.90	39.90	61.27	61.27	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Tidak tercapainya target pokok lelang terjadi karena kebijakan di PT Pegadaian (persero) untuk mengedepankan restrukturisasi kredit daripada lelang potensi lelang laku pada tahun 2024

tidak sebesar potensi lelang laku pada tahun tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi bahwa berdasarkan data pokok lelang Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022 sebanyak rata-rata 70% sampai dengan 80% pokok lelang berasal dari lelang Pegadaian. Signifikasi terlihat pada kurun waktu tahun 2021 dan 2022, PT Pegadaian (Persero) menerapkan kebijakan/program *recovery* atas *outstanding loan* sebagai strategi penurunan tingkat kredit macet/*non performing loan* (NPL) dengan cara melelang objek gadai tanpa perpanjangan masa gadai. Hal ini merupakan respons perusahaan atas situasi perekonomian yang terjadi paska Pandemi COVID-19.

Namun, kebijakan ini tidak dilanjutkan pada tahun 2023-2024 sehingga potensi objek lelang menjadi menurun. Di sisi lain baik Kanwil DJKN maupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi PT Pegadaian (Persero) agar menaikkan frekuensi maupun pokok lelang pegadaian.

Gambaran pencapaian IKU lima tahun kebelakang memperjelas pengaruh kebijakan PT. Pegadaian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	100	100	100	-	61.27
2023	100	100	100	100	-	81.78
2022	100	100	100	100	-	213.66
2021	100	100	100	100	-	174.48
2020	100	100	100	100	-	100.42

Selanjutnya, sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel di atas, menampakkan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat diperbandingkan.

#### IKU-6: Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan dalam IKU ini adalah untuk Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara.

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dihitung berdasarkan Nilai *Outstanding* Piutang Negara yang berhasil diturunkan kepada KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku yang dihitung dari pembayaran angsuran oleh debitur dan nilai pengembalian BKPN, Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT), dan nilai penyelesaian dengan *Crash Program* Keringanan Utang (CPKU).

Pada Tahun 2024, IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dari Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berhasil mencapai presentase tertinggi secara nasional yaitu sebesar 1422,84% dengan nilai Rp. 61.622.550.108,48 dari target sebesar Rp4.330.941.151,27. Adapun secara trajectory gambaran capaian iku ini sebagai berikut:

K-WIDE	SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2c-CP - Persentase penurunan outstanding piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	433.67%	99.37%	99.37%	127.60%	99.37%	1614.36%	1614.36%	
Capaian	433.67%	99.37%	99.37%	1614.36%	1614.36%	1614,36%	1614,36%	
Nilai Kinerja	120	99.37	99.37	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian IKU selama kurun waktu 5 tahun terakhir maka capaian untuk IKU ini selalu diatas 100% dari target, sebagaimana dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	1614.36
2023	100	-	-	-	-	128.62
2022	100	-	-	-	-	181.07
2021	100	-	-	-	-	174.48
2020	100	-	-	-	-	220.64

Dapat disampaikan bahwa IKU Persentase penurunan outstanding piutang negara tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu maupun dokumen rencana strategis DJKN maupun Dokumen Rencana Kerja Kemenkeu. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingan.

### **Sasaran Strategis 3: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien**

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan *Standar Operating Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan satu IKU yakni Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian.

#### **IKU-7: Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesainya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak

tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi.

Pada tahun 2024 capaian dari IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian adalah 146.22 %, dengan trajectory sebagaimana tabel berikut:

K-TWO	SS 3: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	3a-N - Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	
Realisasi	98.40	110.00	110.00	110.00	109.88	109.67	109.67	
Capaian	131.19%	146.67%	146.67%	146.51%	146.51%	146.22%	146.22%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei internal yang telah dilakukan dan penyebaran kuesioner terhadap *stakeholder*, dimana hasilnya menunjukkan tren positif dengan meningkatnya tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang dilakukan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Apabila dilihat dari keberadaan IKU selama lima tahun terakhir, maka dapat dijelaskan bahwa IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2023, dengan capaian selama dua tahun terakhir selalu diatas 100% dari target.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	75	-	-	-	-	109.67
<b>2023</b>	70	-	-	-	-	134.50
<b>2022</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2021</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2020</b>	-	-	-	-	-	-

Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu maupun dokumen rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, maupun Dokuman Rencana Kerja Kemenkeu dan standar nasional. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingan.

## Sasaran Strategis 4: Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam Siklus BMN, diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara dikatakan efektif apabila penerapan pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik, tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan sasaran strategis tata kelola kekayaan negara yang efektif diukur dengan dua indikator IKU, yakni Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan dan Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio aset).

### **IKU-8: Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan**

Tujuan dari IKU ini adalah Mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah

(Valserah).

Pada tahun 2024, realisasi capaian Kanwil Papua, Papua Barat, dan Maluku pada IKU ini adalah sebesar 167.58% dari target sertifikasi BMN 100%.

K-ONE	SS 4: Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4a-CP - Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	-	61.28%	61.28%	126.84%	126.84%	167.58%	167.58%	
Capaian	-	153,2%	153,2%	211,4%	211,4%	167.58%	167.58%	
Nilai Kinerja		120	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Apabila diperbandingkan dengan capaian selama lima tahun terakhir, penyelesaian kegiatan ini berhasil selalu mencapai >100% dari target dengan tren meningkat setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	100	-	100	100	-	167.58
<b>2023</b>	100	-	100	100	-	118.04
<b>2022</b>	100	-	100	100	-	112.68
<b>2021</b>	100	-	100	-	-	100.19
<b>2020</b>	100	-	100	-	-	117.39

IKU ini tidak terdapat dalam dokumen renstra kemenkeu namun dicantumkan pada renstra DJKN 2020-2024 dan dokumen rencana kerja.

Selanjutnya, sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel di atas, menampakkan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat diperbandingkan.

### **IKU-9: Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Tujuan pelaksanaan kegiatan dalam IKU ini adalah guna mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset.

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait aset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

Adapun hasil kinerja Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selama tahun 2024 sebesar 132.71% dari target, sebagaimana trajectory capaian IKU tersebut disajikan dalam tabel berikut:

K-TWO	SS 4: Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4b-N - Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	17,86%	32,14%	32,14%	57,14%	57,14%	132.71%	132.71%	
Capaian	120%	107%	107%	95%	95%	132.71%	132.71%	

Nilai Kinerja	120	107	107	95	95	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	100	-	-	-	-	132.71
<b>2023</b>	100	-	-	-	-	116.24
<b>2022</b>	100	-	-	-	-	120.63
<b>2021</b>	100	-	-	-	-	126.74
<b>2020</b>	100	-	-	-	-	124.05

Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa IKU Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio aset) tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu maupun dokumen rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, maupun Dokumen Rencana Kerja Kemenkeu dan standar nasional. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan.

Hal yang mendukung pencapaian target dalam Tahun 2024 IKU dari SS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal semuanya mencapai target bahkan melampaui target, adalah:

- a. pemahaman yang baik oleh satker tentang pentingnya pengelolaan BMN secara tertib khususnya terhadap BMN berupa tanah;
- b. terjalinnnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku serta KPKNL dengan Satker-satker dalam hal kerjasama pengelolaan BMN secara tertib;
- c. segala permasalahan dapat dimitigasi dengan baik oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

### Sasaran Strategis 5: Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dibidang piutang negara dan lelang, penerapan tata

kelola piutang negara dan lelang dikatakan efektif apabila pelaksanaan pengelolaan piutang negara serta pelayanan lelang yang dilaksanakan dapat sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance), tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan sasaran strategis ini dilihat pada dua indikator kinerja, yakni : Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara dan Persentase Produktivitas lelang.

#### **IKU-10: Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara**

Tujuan IKU ini adalah Percepatan penyelesaian saldo BKPN dan validitas data Piutang Negara pada Aplikasi FocusPN serta konsolidasi data penyelesaian piutang dengan kualifikasi macet pada K/L/Pemda yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN namun telah dikelola secara optimal.

Indikator Kinerja Utama Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;

7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Merupakan IKU minimize dengan target di 2024 persentase saldo BKPN sebesar 69% yang kemudian diaddendum menjadi 67% dari saldo BKPN per 1 Januari 2024 pada focusPN. Pada tahun 2024 hasil kerja pelaksanaan kegiatan ini berhasil tercapai pada posisi realisasi 48.72% sehingga capaian sebesar 127.29%. Adapun trajectory realisasi capaian iku dimaksud sebagaimana tabel berikut:

K-TWO	SS 5: Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	5a-CP - Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	97%	92%	92%	82%	82%	67%	67%	
Realisasi	100%	89,74%	89,74%	79,49%	79,49%	48,72%	48,72%	
Capaian	50.75%	66.05%	66.05%	81.36%	81.36%	127.29%	127.29%	
Nilai Kinerja	50.75	66.05	66.05	81.36	81.36	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Dapat disampaikan bahwa IKU Persentase saldo BKPN ini merupakan IKU baru yang dimunculkan pada tahun 2024. Kegiatan yang mirip atau terkait pada tahun sebelumnya tercatat pada IKU kinerja penyelesaian BKPN. Perbedaan utama yang menjadi penekanan pada saldo BKPN tahun 2024 adalah memasukkan kewajiban atau standar pengukuran berbasis data aplikasi fokusPN yang merupakan digitalisasi dari BKPN fisik.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	67	-	-	-	-	48.72
<b>2023</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2022</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2021</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2020</b>	-	-	-	-	-	-

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa IKU Persentase Saldo BKPN ini tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu maupun

dokumen rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, maupun Dokumen Rencana Kerja Kemenkeu dan standar nasional. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingan.

### **IKU-11: Persentase produktivitas lelang**

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang. Diharapkan lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Capaian selama tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut:

K-ONE	SS 5: Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	5b-CP - Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	
Realisasi	59,26%	76.77%	76.77%	97.31%	97.31%	120.35%	120.35%	
Capaian	197.54%	170.60%	170.60%	162.18%	162.18%	135.07%	135.07%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Produktivitas Lelang berdasarkan perjanjian kinerja, target jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sd. 2024.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu )	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	89	-	34	36		120.21
<b>2023</b>	80	-	34	-		116.22
<b>2022</b>	36	-	34	-		56.85
<b>2021</b>	35	32	32	32		48.91
<b>2020</b>	34	-	-	30		43.18

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta

rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

### **Sasaran Strategis 6: Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional**

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Pengukuran kinerja pencapaian sasaran ini dijelaskan pada indikator Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian.

#### **IKU-12: Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian**

Tujuan dari IKU ini adalah Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian BMN dalam penentuan tarif pemanfaatan dan nilai limit penjualan.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN.

Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Adapun realisasi kinerja Kanwil pada tahun 2024 adalah sebesar 199.89%, dengan trajectory sebagai berikut :

K-ONE	SS 6: Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							
	6a- CP - Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
Realisasi	0.03%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	
Capaian	199.84%	199.8%	199.8%	199.88%	199.88%	199.89%	199.89%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Apabila dilihat perbandingan capaian kinerja IKU ini dalam lima tahun terakhir memberikan pencapaian diatas 100% dengan tren selalu meningkat dibandingkan setiap tahun sebelumnya.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu )	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	16	-	26	26	-	0.02
<b>2023</b>	25	-	27	27	-	0.19
<b>2022</b>	19	-	28	28	-	1.04
<b>2021</b>	22	-	29	29	-	1.36

<b>2020</b>	30	-	30	30	-	1.61
-------------	----	---	----	----	---	------

Selanjutnya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

### SS 7: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi dan SDM merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pelaksanaan sasaran strategis dari kegiatan ini dicapai melalui dua indikator kinerja, yakni : Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko dan Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.

#### **IKU-13: Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko**

Tujuan yang hendak diwujudkan dari pelaksanaan IKU ini adalah Untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Adapun realisasi kinerja Kanwil pada tahun 2024 untuk IKU ini adalah dalam angka indeks sebesar 99.01 atau diperoleh nilai capaian sebesar 116% dari target indeks 85, secara rinci sebagaimana trajectory tabel berikut:

K-TWO	SS 7: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	7a-N - Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	
Realisasi	100	96.43	96.43	98.49	98.49	99.01	99.01	
Capaian	117.65%	113%	113%	116%	116%	116%	116%	
Nilai Kinerja	117.65	113	113	116	116	116	116	

Gambaran capaian IKU dibandingkan perjanjian kinerja selama lima tahun terakhir, bahwa IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko merupakan IKU yang baru dimunculkan pada tahun 2023, dengan capaian sebesar 96.65 dari target indeks 80, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	85	-	-	-	-	99.01
<b>2023</b>	80	-	-	-	-	96.65
<b>2022</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2021</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2020</b>	-	-	-	-	-	-

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko ini tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu maupun dokumen rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, maupun Dokumen Rencana Kerja Kemenkeu dan standar nasional. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan.

Adapun indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko mendapat penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai salah satu dari 3 (tiga) Unit Terbaik Manajemen Risiko Tahun 2024.

#### **IKU-14: Persentase pengembangan kompetensi pegawai**

Indikator ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKJ telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKI ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024 Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku berhasil memperoleh realisasi capaian kinerja pada IKU ini sebesar 120% dari target 100%, dengan gambaran trajectory pencapaian IKU sebagai berikut:

K-TWO	SS 7: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	7b-N - Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	17.14%	53,94%	53,94%	116.57%	116.57%	120%	120%	
Capaian	114.29%	134.85%	134.85%	155.43%	155.43%	120%	120%	
Nilai Kinerja	114.29	134.85	134.85	155.43	155.43	120	120	

Berikut capaian IKU apabila dibandingkan dengan hasil kinerja pada kurun waktu lima tahun terakhir, konsisten pencapaian pada angka maksimal 120 % ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	100	-	-	-	-	120
<b>2023</b>	100	-	-	-	-	120
<b>2022</b>	100	-	-	-	-	120

<b>2021</b>	100	-	-	-	-	120
<b>2020</b>	100	-	-	-	-	120

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai ini tidak terdapat target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu maupun dokumen rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, maupun Dokumen Rencana Kerja Kemenkeu dan standar nasional. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingan.

### SS 8: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sasaran kinerja diukur melalui dua indikator yakni : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dan Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN.

#### IKU-15: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tujuan dari IKU ini untuk Mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7). Nilai kinerja anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2024 hasil kinerja indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil dicapai sebesar indeks 99.02 atau capaian 120% . Angka tersebut berasal dari Nilai IKPA 100 dan Nilai SMART 98.0395.

Atas pencapaian tersebut Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku memperoleh penghargaan sebagai Kantor Terbaik Pertama Kategori IKPA Terbaik Satker Lingkup Kemenkeu dengan nilai 100.

K-WIDE	SS 8: Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	8a-CP- Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	103.88	105.26	105.26	105.26	105.26	99.02	99.02	
Capaian	104%	105%	105%	105%	105%	120%	120%	
Nilai Kinerja	104	105	105	105	105	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut digambarkan trajectory pencapaian IKU sebagai berikut:

Berikut gambaran pencapaian IKU kualitas pelaksanaan anggaran selama lima tahun terakhir memperlihatkan kinerja yg terus meningkat, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu )	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	100	84	95	100	-	120
<b>2023</b>	100	83	95	95	-	114.52
<b>2022</b>	95.5	82	95	-	-	97.25
<b>2021</b>	95,5	81	95	-	-	97.23
<b>2020</b>	95	80	95	-	-	99.14

Selanjutnya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020

serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

### **IKU 16: Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN**

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan Akurasi penyajian Data PNBP DJKN yang handal.

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785.

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, pada Kanwil merupakan selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%. Merupakan jenis IKU nilai minimize dimana nilai realisasi semakin kecil semakin tinggi capaian.

Adapun realisasi dari persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN adalah sebesar 200%, dengan trajectory sebagai berikut :

K-TWO	SS 8: Pengelolaan keuangan yang akuntabel							POL/KP
	8b-N - Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut perbandingan capaian kinerja dari IKU deviasi data PNBP fungsional selama lima tahun terakhir. IKU ini dimunculkan pada tahun 2021-2022. Kemudian pada tahun 2023 IKU ini tidak muncul, dan dimunculkan lagi pada tahun 2024. Indeks Capaian selama IKU ini dilaksanakan konsisten tercapai diatas 100%.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu )	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	10	-	-	-	-	0.00

<b>2023</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2022</b>	10	-	-	-	-	0,00
<b>2021</b>	12,5	-	-	-	-	0,20
<b>2020</b>	-	-	-	-	-	-

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai ini tidak terdapat target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu maupun dokumen rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, maupun Dokumen Rencana Kerja Kemenkeu dan standar nasional. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingan.

### Sasaran Strategis 9: Komunikasi publik yang efektif

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Indikator pencapaian sasaran kegiatan ini diukur dengan dua IKU yakni Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID).

### IKU 17: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran yaitu Partisipasi Agenda Setting dan Employee Advocacy. Partisipasi Agenda Setting merupakan kegiatan kehumasan yang dilakukan sesuai taktik yang terdapat pada topik Agenda Setting Kementerian Keuangan. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kehumasan tersebut di tataran unit vertikal DJKN adalah dokumen strategi komunikasi tematik yang disampaikan secara berkala melalui nota dinas. Selama tahun 2024, terdapat 18 (delapan belas) strategi komunikasi tematik berdasarkan *Agenda Setting* Kementerian Keuangan. Adapun *Employee Advocacy* berupa tugas amplifikasi konten media sosial

Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh pemangku tugas komunikasi. Pada tahun 2024, terdapat 15 topik yang perlu diamplifikasi pemangku tugas.

Berdasarkan data yang disampaikan Direktorat Hukum dan Humas, Tingkat partisipasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku pada Agenda Setting selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Partisipasi AS	Employee Advocacy	Realisasi	Capaian
Triwulan I	100	100	5,23	120%
Triwulan II	100	100	5,14	120%
Triwulan III	100	100	5,23	120%
Triwulan IV	100	100	5,23	120%

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dalam melaksanakan *employee advocacy*, dilakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut.

1. Menyampaikan himbauan partisipasi pegawai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku untuk berpartisipasi dalam kegiatan *employee advocacy* melalui nota dinas.
2. Membentuk grup Whatsapp khusus *employee advocacy* yang beranggotakan seluruh pegawai pemangku tugas *employee advocacy*.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *employee advocacy* lingkup Kanwil DJKN Papabaruku pada dashboard *employee advocacy*, sehingga dapat diketahui Tingkat partisipasi pegawai dalam *employee advocacy* dan mengingatkan pegawai yang belum melakukan amplifikasi. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan pada tahun 2024 adalah sebesar indeks 5,23 dari target indeks 3,55 sehingga capaian kinerja sebesar 120%.
4. Langkah-langkah tersebut menghasilkan tingkat partisipasi Pegawai dalam kegiatan *Employee advocacy* di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku yang cukup tinggi. Hal tersebut terbukti dengan diraihnya penghargaan sebagai Unit Kerja *Employee Advocacy* Terbaik Kelompok III Tahun 2024 secara nasional. Adapun trajectory pencapaian iku ini tergambar sebagai berikut:

K-WIDE	SS 9: Komunikasi publik yang efektif	
	9a-CP - Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	

T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	
Realisasi	5.23	5.14	5.14	5.23	5.23	5.23	5.23	
Capaian	147%	145%	145%	147%	147%	147%	147%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Selanjutnya berkaitan dengan keterkaitan IKU dengan renstra kemenkeu dan renstra DJKN, maka IKU Indeks Ekosistem Kehumasan di tingkat kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku baru disematkan menjadi IKU Kakanwil sejak tahun 2024, walaupun secara Renja Kemenkeu sudah dicanangkan dalam tahun 2023 dan 2024. Dengan demikian hasil kinerja tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra dan Standar Nasional.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	3.55	-	-	-	-	5.23
<b>2023</b>	-	-	-	3.55	-	-
<b>2022</b>	-	-	-	3.5	-	-
<b>2021</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2020</b>	-	-	-	-	-	-

#### **IKU 18: Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU

Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Pada tahun 2024 capaian IKU indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) adalah sebesar 125%.

K-WIDE	SS 9: Komunikasi publik yang efektif							POL/KP
	9b-CP - Indeks pengelolaan layanan informasi public							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	105.65	100	100	100	100	100	100	
Capaian	132%	125%	125%	127%	147%	125%	125%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

IKU ini merupakan IKU baru dimunculkan tahun 2024, tidak terdapat dalam rencana strategis dan standar nasional, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	80	-	-	-	-	100
<b>2023</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2022</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2021</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2020</b>	-	-	-	-	-	-

## Sasaran Strategis 10: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur dengan dua indikator kinerja: Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal dan Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM.

### **IKU 19: Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)**

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut:

#### **A. Komponen Pengungkit (Bobot 25%)**

1. Komitmen Pimpinan (7,5%); Subkomponen ini mengukur komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas UKI.
2. Dukungan Sumber Daya Manusia (7,5%); Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI
3. Akses Data dan Informasi (5%); Subkomponen ini mengukur akses UKI atas data & informasi terkait proses bisnis yang dipantau.
4. Komunikasi (5%); Subkomponen ini mengukur pelaksanaan komunikasi UKI dengan pimpinan & pegawai di unit kerjanya, dengan UKI di tingkat atasnya, maupun dengan Itjen (Auditor Mitra/Tim Pembina UKI)

#### **B. Komponen Proses (25%)**

1. Pemilihan Probis yang dipantau (4%); Subkomponen ini mengukur pelaksanaan

- pemilihan proses bisnis yang dipantau oleh UKI.
2. Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (4%); Subkomponen ini mengukur penyusunan RCM dan FRS yang dilakukan oleh UKI.
  3. Profiling Pegawai (4%); Subkomponen ini mengukur kesesuaian penyusunan profil pegawai UKI serta tindak lanjut atas profil yang disusun.
  4. Penyusunan Program Kerja (3%); Subkomponen ini mengukur program kerja yang disusun oleh UKI dalam rangka pemantauan.
  5. Pelaksanaan Pemantauan (3%); Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Pengendalian Intern serta tindak lanjut hasil pemantauannya.
  6. Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%); Subkomponen ini mengukur penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern dari hasil pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI.
  7. Pelaporan Pengendalian Internal (4%); Subkomponen ini mengukur proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh UKI.

**C. Komponen Hasil (Bobot 50%)**

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%); Subkomponen ini mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (fraud dan non fraud) yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal.
2. Penyelesaian Laporan informasi pada Aplikasi J3Li (15%); Subkomponen ini mengukur efektivitas penyelesaian laporan informasi yang ditujukan kepada UKI pada Aplikasi J3Li.
3. Kejadian Tangkap Tangan (20%); Subkomponen ini mengukur kontribusi UKI atas kejadian tangkap tangan oleh Itjen dan APH, maupun fraud yang ada di unit eselon I.

Capaian kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku pada tahun 2024 untuk IKU ini adalah sebesar Indeks 95.87 lebih tinggi dari target indeks 82, sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 116,91%.

K-WIDE	SS 10: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	10a-N - Indeks efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	-	15	15	20	20	82	82	
Realisasi	-	15	15	20	20	95.87	95.87	

Capaian						116,91%	116,91%	
Nilai Kinerja						116.91	116.91	

Apabila dilihat keberadaan IKU Indeks efektivitas UKI kaitannya dengan Renstra dan Renja, bahwa tidak terdapat target jangka menengah maupun dalam standar nasional. IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2024.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	82	-	-	-	-	95.87
<b>2023</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2022</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2021</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2020</b>	-	-	-	-	-	-

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa IKU Indeks Efektivitas UKI ini tidak terdapat target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu maupun dokumen rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, maupun Dokumen Rencana Kerja Kemenkeu dan standar nasional. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingan.

#### **IKU-20: Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZIWBK/WBBM**

Tujuan dari pelaksanaan IKU ini adalah untuk memastikan unit kerja tetap menjaga dan mempertahankan integritas melalui komitmen melanjutkan pembangunan Zona Integritas.

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan

sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2024, dalam rangka keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku berhasil memperoleh nilai hasil kinerja sebesar 120% dari target 100%.

K-WIDE	SS 10: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	10b-N - Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu)							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-24	POL/KP
Target	-	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	-	100	100	100	100	120	120	
Capaian						120%	120%	
Nilai Kinerja						120	120	

IKU tingkat capaian unit kerja merupakan kegiatan yang ditetapkan hanya pada tahun 2024 sebagai tindaklanjut atas pencapaian unit kerja dalam WBK. Capaian keberhasilan dalam pelaksanaannya menjadi dasar untuk pengajuan unit kerja untuk mengikuti tahap pembangunan unit ZI-WBBM.

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	100	-	-	-	-	120
<b>2023</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2022</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2021</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2020</b>	-	-	-	-	-	-

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa IKU Indeks Efektivitas UKI ini tidak terdapat target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu maupun dokumen rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, maupun Dokumen Rencana Kerja Kemenkeu dan standar nasional. Sehingga, dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan.

## **Aspek-aspek Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Organisasi**

Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi pada tahun 2024 sebesar 113,59%. Angka ini meningkat satu point dari capaian tahun 2023, namun masih lebih tinggi dari rata-rata capaian selama 4 tahun terakhir (112,80%).

Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

### *Secara Internal*

1. Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku melakukan upaya berkelanjutan dalam menciptakan budaya kerja organisasi yang positif. Dengan mengusung semangat “noken ale torang bisa” menjadikan keinginan kuat mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang merupakan aset kita bersama yang perlu kita jaga bersama untuk mendukung kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk menjaga terpeliharanya dan Implementasi budaya organisasi yang positif ini, dilakukan internalisasi setiap pekan melalui kegiatan “Honai” setiap senin pagi yang diikuti seluruh pegawai dan PPNPN. Effort ini didukung dengan leadership yang baik dapat membantu menjaga organisasi berada di jalur yang tepat dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan kinerja. Kaitannya dengan kinerja, maka budaya organisasi yang positif dapat membantu meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan.
2. Sumber daya manusia di Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku mampu digerakkan secara efektif dalam kondisi terbatas. Kita maklumi dari jumlah SDM yang jumlahnya terbatas, bagaimana memompa dan memelihara etos kerja yang tinggi di lingkup kerja zona remote adalah tantangan tersendiri. Keberhasilan pimpinan organisasi menjaga motivasi dan profuktivitas pegawai memberi signifikansi keberhasilan pencapaian kinerja.
3. Strategi alur kerja responsif dan mitigasi risiko; ketersediaan rumah dinas yang memadai dan akses yang relatif mudah (aglomerasi kota jayapura kecil) dari seluruh pegawai memberi keuntungan relatif dalam respon yang cepat dalam menanggapi isu-isu dan penyelesaian tusi yang lebih cepat. Selanjutnya secara kontinyu melakukan mitigasi risiko dan antisipasi tindakan untuk mencegah kegagalan pencapaian indikator kinerja;

### *Secara Eksternal*

1. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kesepahaman yang tinggi kepada satker dan stakeholder lainnya tentang pentingnya pengelolaan kekayaan negara, penilaian aset,

dan lelang secara tertib dan memberi tambahan manfaat moneter (PNBP) maupun meningkatkan efisiensi penggunaan BMN dan aset lainnya;

2. Memperluas inklusi dan kampanye literasi keuangan negara dan APBN kepada semua pihak dan masyarakat guna meningkatkan persepsi positif fungsi kementerian keuangan sekaligus memperluas manfaat keberadaan perwakilan kementerian keuangan di daerah. Salah satu yang dilakukan adalah kerjasama dengan kampus-kampus di wilayah papua dalam bentuk bantuan tenaga pengajar, kerjasama dengan pemerintah daerah dan bantuan edukasi sektor UMKM.
3. Memanfaatkan dan mengupdate lingkungan teknologi dan jaringan komunikasi yang efektif dalam memperlancar pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dan masyarakat.

#### **Aspek-aspek Penghambat Pencapaian Kinerja Organisasi**

1. Kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia (ASN) yang ditempatkan di Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Kondisi SDM yang berpengaruh dalam rangka pencapaian kinerja organisasi adalah berkenaan dengan aspek motivasi dan produktivitas. Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku sebagai kantor vertikal yang berada di zona remote berada dalam beziting jumlah pegawai yang kurang secara jumlah. Demikian juga secara "lokasi" memberikan dampak psikologis tertentu kepada para pegawai terutama dari aspek tekanan biaya hidup, biaya pulang ke homebase dan kewaspadaan gangguan keamanan. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan demotivasi pegawai yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas.

Kekurangan SDM di Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dalam dua tahun terakhir terutama pada formasi jabatan struktural baik Pejabat Administrator maupun Pejabat Pengawas yang selalu ada kekosongan pada 2-3 jabatan.

2. Daya dukung anggaran

Luas geografis wilayah kerja berikut potensi gangguan keamanan dalam pelaksanaan tugas instansi dan kehidupan sehari-hari pegawai, dengan sendirinya merupakan faktor sebab akibat/kondisi negatif dibutuhkannya dukungan anggaran yang besar. Dengan kondisi anggaran yang dibatasi, berbagai inovasi dan strategi percepatan pencapaian target kinerja dalam banyak hal terbentur pada kondisi minor tersebut.

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam laporan kinerja ini diutamakan pada penggunaan DIPA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan. Dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, kita dapat mengurangi biaya, dengan tetap meningkatkan produktivitas.

Realisasi anggaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp3.671.267.204,- atau 98,41% dari total pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp3.730.430.000,-. Penggunaan anggaran tersebut telah berhasil mendukung pencapaian kinerja organisasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku yang berhasil memperoleh nilai NKO tahun 2024 sebesar 113,59%. Artinya organisasi berhasil mencapai kinerja optimal (status hijau) dari DIPA yang disediakan dan tidak habis terserap, menggambarkan terpenuhinya aspek efisiensi dalam penggunaan sumber daya terutama sumber daya DIPA.

Salah satu upaya dalam mencapai efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah kepatuhan dalam penyerapan DIPA sesuai RPD dan selalu dilakukan monitoring berkelanjutan sekaligus menyelesaikan langsung jika ada deviasi pelaksanaan anggaran.

Secara terperinci jumlah rupiah pengeluaran belanja per kegiatan yang mendukung pencapaian IKU digambarkan dalam tabel pada bagian lampiran laporan LAKIN ini.

Apabila diperbandingkan alokasi DIPA terhadap pencapaian NKO selama 5 tahun terakhir terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Pagu Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Target NKO	Capaian NKO
2020	Rp4.754.620.000	98,27%	100%	110,05%
2021	Rp2.307.929.000	97,23%	100%	113,51%
2022	Rp1.935.303.000	97,25%	100%	115,10%
2023	Rp3.096.802.000	91,73%	100%	112,59%
2024	Rp3.730.430.000	98,41%	100%	113,59%

## B. Kinerja Lainnya

## Inovasi dan Penguatan Infrastruktur

Guna menunjang kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, berbagai inovasi layanan juga telah disusun dan diterapkan agar memberikan kemudahan pelayanan dan kecepatan menjangkau *stakeholder*. Adapun beberapa inovasi layanan yaitu:

1. Buletin Lelang Unggulan, merupakan platform majalah online yang menyediakan informasi barang-barang yang akan dilelang berikut informasi pendukung lelang lainnya guna memperluas cakupan penyebaran dan atau pemasaran objek lelang yang akan dilelang oleh KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku;
2. layanan pengaduan melalui media aplikasi *whatsapp*;
3. layanan *chatbot* NokenAle; dan
4. dashboard capaian kinerja *realtime*, merupakan link web tempat menginput dan menyajikan informasi kinerja dan dokumen pendukung baik kinerja organisasi maupun kinerja pegawai.

Disamping itu, dalam upaya mendukung dan menunjang *gender equality* dan *disability* telah dilakukan dengan optimal dengan mewujudkan sarana prasarana yang menunjang yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Ibadah/Musholla Khusus Wanita

Musholla khusus wanita di Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen dalam mendukung dan menunjang kesetaraan gender. Fasilitas ini memberikan ruang yang nyaman dan aman bagi para pegawai wanita untuk menjalankan ibadah mereka tanpa hambatan. Dengan adanya musholla khusus ini, diharapkan para pegawai wanita dapat merasa lebih dihargai dan diakui hak-haknya, serta semakin termotivasi untuk berkontribusi lebih maksimal dalam lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender. Langkah ini juga menegaskan bahwa DJKN berupaya menciptakan tempat kerja yang adil dan setara bagi seluruh karyawan tanpa memandang gender.



## 2. Ruang Laktasi

Ruang laktasi di Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku adalah salah satu inisiatif penting dalam mendukung dan menunjang kesetaraan gender. Fasilitas ini dirancang khusus untuk memberikan ruang yang aman, bersih, dan nyaman bagi ibu menyusui di tempat kerja, sehingga mereka dapat menjalankan peran ganda sebagai profesional dan ibu dengan lebih baik. Dengan adanya ruang laktasi, DJKN menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kesejahteraan semua pegawai, tanpa memandang gender. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan, serta memperkuat budaya kerja yang adil dan setara di semua level organisasi.



## 3. Fasilitas penunjang disabilitas

Penyediaan kursi roda dan ramp di Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan langkah strategis dalam mendukung dan menunjang inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas ini memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi pegawai

dan pengunjung dengan kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat bergerak dengan lebih bebas dan aman di lingkungan kerja. Dengan adanya kursi roda dan ramp, DJKN menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan tempat kerja yang ramah dan setara bagi semua individu, tanpa memandang kondisi fisik. Inisiatif ini juga mencerminkan upaya DJKN untuk menghormati hak-hak penyandang disabilitas dan memberikan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat berkontribusi secara optimal.



### ***Achievement Lainnya***

Pada bagian lain, banyak pencapaian/*achievement* yang telah dihasilkan oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dengan beberapa kegiatan dalam rangka implementasi *sosial inclusion*, guna memberi dampak manfaat yang lebih luas akan keberadaan organisasi Kementerian Keuangan di masyarakat, antara lain :

1. pelaksanaan kegiatan Webinar “Pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang Berperspektif Gender” pada hari Senin, 4 November 2024, dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal kemenkeu, unsur daerah (BPKAD) serta masyarakat luas.
2. Pelaksanaan kegiatan Bhakti Sosial dan Tanam Mangrove, bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Memberamo Papua dan

Komunitas Rumah Bakau Jayapura berlokasi di kawasan pantai Ciberi Jayapura pada tanggal 19 Oktober 2024.

3. Kegiatan *Coaching Program For New Exporter Collaboration UMKM Papua* di GKN Jayapura pada tanggal 21 Oktober 2024, merupakan kegiatan dukungan pelatihan bekerja sama dengan LPEI dengan maksud memberikan edukasi peningkatan kapasitas bisnis UMKM Papua agar naik kelas menjadi eksportir yang sukses.
4. Kerjasama dengan Lembaga Penyiaran TVRI Papua dan Surat Kabar Cendrawasih Pos Jayapura, yang bertujuan untuk mengamplifikasi program kerja dan tuisi Kemenkeu/Kanwil DJKN pada khususnya agar literasi dan pemahaman masyarakat akan tuisi DJKN dan Kemenkeu pada umumnya semakin meningkat, hal mana tersebut akan mendukung pencapaian tujuan.
5. MOU dengan Universitas Cenderawasih Jayapura dan Universitas Musamus Merauke dalam rangka bantuan sebagian tuisi terkait pengelolaan kekayaan negara, penilaian dan lelang. Sekaligus disepakati kerjasama bantuan tenaga Pengajar dari unsur Praktisi Keuangan Negara.
6. Dukungan untuk dunia pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, melalui Hibah Aset Barang Yang dikuasai Negara Eks Yayasan Kerjasama Pengembangan Irian Jaya (*IJJDF*) berupa tanah yang diperuntukkan guna lokasi penyelenggaraan Sekolah Dasar bagi masyarakat setempat.

### C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp3.671.267.204,- atau 98,41% dari total pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp3.730.430.000,-. Pagu anggaran terdiri dari dua jenis belanja, yaitu belanja barang dan belanja modal sebagai berikut:

No.	Kode / Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja		Total
			Barang	Modal	
1	506409 Kanwil DJKN Papabaruku	Pagu Anggaran	2,926,118,000	804,312,000	3,730,430,000
		Realisasi Anggaran	2,867,219,404	804,047,800	3,671,267,204
		%	97.99	99.97	98.41
		Sisa Anggaran	58,898,596	264,200	59,162,796

Rincian belanja dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk belanja barang mencapai 97,99% dari pagu anggaran yang ditetapkan, sementara belanja modal tercatat hampir sepenuhnya terealisasi dengan persentase 99,97%. Adapun sisa anggaran yang belum terealisasi untuk belanja barang sebesar Rp58.898.596,-, dan untuk belanja modal sebesar Rp264.200,-.

## **Bab IV**

### **Penutup**

Laporan

Matahari juga turut berpengaruh dalam menjadi siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah

## **Bab IV**

### **Penutup**

Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selama tahun 2024 merupakan capaian yang istimewa dengan NKO sebesar 113,59%. Hal ini bisa dilihat dari capaian yang diraih selama tahun 2024 dimana 20 IKU yang dimiliki Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, mayoritas IKU dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan (hijau), hanya terdapat 1 (satu) IKU yang tidak tercapai (merah) yaitu Realisasi Pokok Lelang namun secara agregat tetap menghasilkan NKO naik dari tahun sebelumnya. Capaian NKO Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tersebut, tidak terlepas dari kerja keras dan semangat dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu pegawai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku termasuk jajaran KPKNL di bawahnya menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan sehingga mendapatkan capaian yang optimal.

Adanya masalah/kendala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan pada BAB I, bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak berbuat yang terbaik bagi organisasi, yaitu dengan bekerja lebih giat serta terus menerus membangun semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menjadi

karakter kinerja seluruh pegawai. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan prestasi/capaian kinerja yang sudah baik dan terus berusaha untuk meningkatkannya.

## **LAMPIRAN**

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Instansi : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Tahun : 2024

### NILAI KINERJA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Tahun 2024

Kode	IKU	Target 2024	Realisasi s.d Q4	Indeks Tanpa Batas	Indeks Batas Max. 120%
30%	Stakeholder Perspective				<b>115.44%</b>
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan				<b>105.79%</b>
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan (Unit Tertentu)	100%	110.36%	<b>114.81%</b>	110.36
1b-CP	Indeks Integritas Organisasi	100%	102.45%	<b>105.56%</b>	102.45
1c-CP	Indeks Integritas	89.17	92.44		103.67

20%	Customer Perspective				<b>111.96%</b>
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa				<b>99.50</b>
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	117.21%	121.35%	120.00%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	90%	61.27%	133.33%	61.27%
2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	1614.36 %		120
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien				<b>120</b>
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	109.67	129.81%	120
25%	Internal Process Perspective				<b>111.96%</b>
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif				<b>120</b>
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	167.58%	106.40%	120
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	132.71%		120
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif				<b>120</b>
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67%	48.72%	112.7%	120
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	120.21%		120
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional				<b>120%</b>
6a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0.02%	109%	120
25%	Learning and Growth Perspective				<b>113.86%</b>
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				<b>118.24</b>
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	99.01	114.68%	116.48
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100	120		120
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				<b>120%</b>
8a-CP	Indeks kinerja anggaran	100%	120%	117.15%	120%
8b-N	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10%	0%	123.19%	120%
9	Komunikasi publik yang efektif				<b>120%</b>
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	5.23	199.98%	120.00%
9b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	100		120
10	Pengawasan dan				<b>118.69%</b>

	pengendalian internal yang bernilai tambah				
10a-N	Indeks efektivitas UKI	100	109.94	110%	109.94%
10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	100	120		120
10b-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN	<b>Adendum Hapus</b>			
11	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif				<b>106.31%</b>
11a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti	90%	95%	106%	105.56%
11b-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	95.18%	111%	110.67%
11c-CP	Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat	100%	102.5%	103%	102.50%
25%	Learning & Growth Perspective				<b>112.00%</b>
12	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif				<b>113.44%</b>
12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	119.74%	119.74%	119.74%
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)</b>					<b>113.49%</b>

#### Ceklist kontrol penyelesaian LAKIN 2024

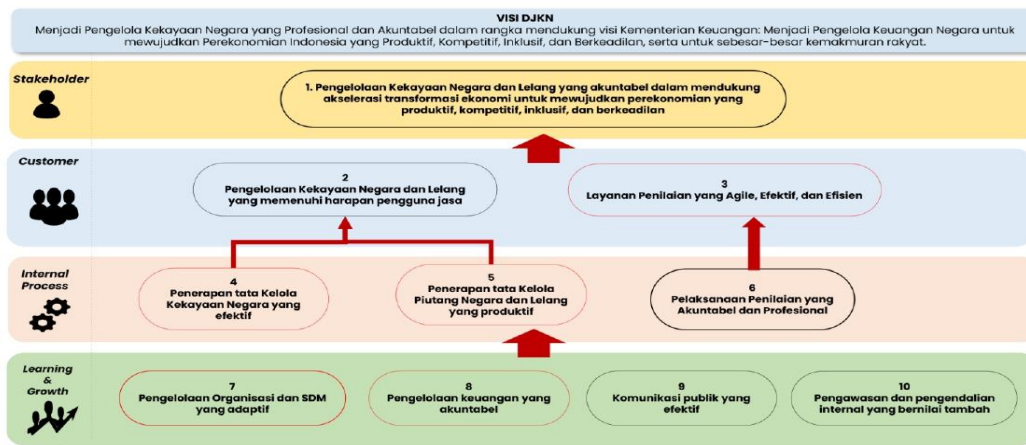
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√

4	<p>Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√



**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-29/KN/2024  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

**Peta Strategi**





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp49,05M)
		1c-CP Indeks integritas	89,17
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-N Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp842,07 M)
		2c-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100% (3,05 M)
3.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
4.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	69% (27 Berkas)
		5b-CP Persentase produktivitas lelang	89%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		7b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		8b-N Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10%
9.	Komunikasi publik yang efektif	9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55
		9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	10a-N Indeks efektivitas UKI	82
		10b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%



<b>Program/Kegiatan Tahun 2024</b>	<b>Anggaran</b>
<b>Program:</b>	
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>	Rp 1.242.554.000
<b>Kegiatan</b>	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 51.006.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 597.486.000
3. Pengelolaan Aset	Rp 594.062.000
<b>Program:</b>	
<b>Dukungan Manajemen</b>	Rp 2.139.463.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 41.618.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.993.934.000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 34.735.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 69.176.000
Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
 Ditandatangani Secara Elektronik Rionald Silaban	 Ditandatangani Secara Elektronik Wibawa Pram Sihombing

**RINCIAN TARGET KINERJA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
	2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2c-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
4	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	92%	92%	85%	85%	69%	69%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Persentase Deviasi data PNPB Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9	Komunikasi publik yang efektif							
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
10a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wibawa Pram Sihombing



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara  
Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wibawa Pram Sihombing



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Wibawa Pram Sihombing	NAMA	Rionald Silaban	
NIP	197609061999031001	NIP	196604231990101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	<i>Penerima Layanan</i>
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	<i>Penerima Layanan</i>



	produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Indeks integritas	89,17	<i>Penerima Layanan</i>	
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	<i>Penerima Layanan</i>	
		Sub-IKI 1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	<i>Penerima Layanan</i>
		Sub-IKI 2	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	<i>Penerima Layanan</i>
		Persentase realisasi pokok lelang		100%	<i>Penerima Layanan</i>
		Persentase penurunan outstanding Piutang Negara		100%	<i>Penerima Layanan</i>
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	<i>Penerima Layanan</i>	
4	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	<i>Proses bisnis</i>	
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	<i>Proses bisnis</i>	
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	69%	<i>Proses bisnis</i>	
		Persentase produktivitas lelang	89%	<i>Proses bisnis</i>	
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	<i>Proses bisnis</i>	
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>	
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>	
8	Pengelolaan keuangan yang	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	<i>Penguatan Internal</i>	



	akuntabel			<i>atau Anggaran</i>
		Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
9	Komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
		Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
<b>B. TAMBAHAN</b>				
1.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase Kehadiran Rapat Dewan Pengawas BLU pada Politeknik Pelayaran Sorong	100%	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>

PERILAKU KERJA			
1	Berorientasi pelayanan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.



PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani</p>



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Wibawa Pram Sihombing

197609061999031001



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban

196604231990101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	39 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target							
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	
4	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub-IKI 1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
	Sub-IKI 2	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%



5	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
10	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	92%	92%	85%	85%	69%	69%
11	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
12	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
13	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
14	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Deviasi data PNPB Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
17	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80



19	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Wibawa Pram Sihombing

197609061999031001



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban

196604231990101001

